
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

PENGARUH SIZE, WEALTH, INTERGOVERNMENTAL REVENUE DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Iim Nur Aminah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
iimnuraminah250@gmail.com

Nunuy Nur Afiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
nunuy@unpad.ac.id

Arie Pratama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran
arie.pratama@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan menggunakan LPPD sebagai sumber utamanya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di wilayah Jawa Barat tahun 2014-2016 yang terdiri dari 18 Kabupaten, 9 Kota dan 1 Provinsi. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh sebanyak 84 pengamatan, setelah dilakukan analisis terdapat 9 data yang tidak sesuai kriteria, sehingga total sampel yang diteliti sebanyak 72 pengamatan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Program SPSS dengan menggunakan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan uji hipotesis dengan metode analisis regresi linier berganda dan terakhir uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel size, wealyh, intergovernmental revenue dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Size; Wealth; Intergovernmental Revenue; Belanja Modal; EKPPD*

THE EFFECT OF SIZE, WEALTH, INTERGOVERNMENTAL REVENUE AND CAPITAL EXPENDITURE ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT

Abstract

This study aims to provide empirical evidence on effect of the size, wealth, intergovernmental revenue and capital expenditure to the performance (EKPPD) derived from local government organizers report (LPPD). Population of this research are all the districk/city in Jawa Barat during 2014-2016, which consist 18 regencies and 9 cities. The sample of 84 data samples during 3 years observation. After doing analisis 12 data aren't criteria the total sample of this study reduced to 72 data. The collected data were analyzed using the classic assumption test, then tested the hypothesis using multiple linier regression analysis method and statistical test conducted by using SPSS software. Result of this study indicate that level size, wealth, intergovernmental revenue and capital expenditure are significant positive effect on the performance of local government district/cities in Jawa Barat

Keywords: *Size; Wealth; Intergovernmental Revenue; Capital Expenditure; EKPPD*

PENDAHULUAN

Di mulai dengan adanya UU No. 22/1999 mengatur kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kebijakan otonomi daerah telah diubah UU No. 32/2004 mengenai otonomi daerah, perubahan terakhir menjadi UU No. 23/2014 mengenai pemerintah daerah. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengelola dan mengatur sumber daya sesuai dengan kemampuannya, serta mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Kewenangan atas alokasi sumber daya secara mandiri mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang akan dijadikan salah satu sumber informasi dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Otonomi daerah juga mengharuskan setiap kepala daerah untuk memberikan laporan dalam kurun waktu satu periode, yang ditujukan kepada pemerintah, yang selanjutnya laporan disebut LPPD.

Permendagri No. 73 Tahun 2009, evaluasi kinerja pemda secara sistematis diawali dengan proses pengumpulan data dan dianalisis menggunakan sistem pengukuran kinerja, dan salah satunya adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Dalam Perkembangannya Kemendagri bersama Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) (Hariyanto, 2018), berupa pemeringkatan, skor dan status kinerja. Pasal 5 Permendagri No,73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama.

Berkembangnya hasil EKPPD Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ke 2 dari 33 Provinsi dengan skor terakhir berada pada 3,2496 sehingga pada tahun tersebut pemerintah provinsi Jawa Barat mendapatkan status dengan kinerja sangat tinggi secara nasional. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan masih adanya kritisi dari masyarakat Jawa Barat yang merasa kurang puas terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kurang maksimal (Pitoko, 2017).

Pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat pada tahun 2017 seharusnya dengan mempunyai sumber dana dan sumber daya yang cukup dapat mengimplementasikan pelayanan yang optimal dari Pemda tersebut kepada masyarakat.

Pada penelitian ini terdiri dari variabel *size* daerah yang ditentukan dengan total aset, *wealth* yang ditentukan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), *intergovernmental revenue* yang ditentukan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal.

Penelitian mengenai *size* daerah sebelumnya telah dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasari (2012), Kusumawardhani (2012) menunjukkan ukuran daerah (*size*) berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriasari, Martani, & Khairurizka (2013) dan Harumiati dan Payamta (2014) hasil penelitiannya menunjukkan ukuran Pemda tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Pemda, menurut Nugroho (2018) ukuran daerah tidak berpengaruh dengan kinerja keuangan pemda karena mayoritas aset milik Pemda tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan keuangan pemda.

Penelitian mengenai *wealth* yang ditentukan dengan Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh Korompo & Warongan (2017), Prasasti dan Purnamasari (2014) dan Puspita (2018) membuktikan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemda, Sebaliknya dengan Khasanah & Rahardjo (2014), menurutnya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif, karena Pemda belum dapat memungut pendapatan dari masyarakat yang berasal dari pajak dan retribusi sehingga menyebabkan menurunnya kinerja Pemda.

Penelitian *intergovernmental revenue* (Tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat) dilakukan oleh Ruliana (2015), Khasanah & Raharjo (2014) dan Nugroho dan Prasetyo (2018) penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemda masih bergantung kepada pusat dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya. Sedangkan Tajudin dan Rahmatia (2014) dan

Prasasti dan Purnamasari (2014) membuktikan bahwa *intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah

Hafizd,(2013) menyebutkan bahwa dengan adanya belanja modal pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan sarana dan insprastruktur yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik serta mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya Nugroho dan Prasetyo (2018) menyatakan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemda.

Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya, peneliti masih melihat hasil ketidakkonsistenan sehingga peneliti ingin menguji kembali bagaimana *size, wealth, intergovernmental revenue* dan belanja modal Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemda di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaruh *size* terhadap kinerja penyelenggaraan pemda di wilayah Jawa Barat; (2) Bagaimana pengaruh *wealth* terhadap kinerja penyelenggaraan pemda di wilayah Jawa Barat; (3) Bagaimana pengaruh *intergovernment revenue* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat; (4) Bagaimana belanja modal berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

TELAAH LITERATUR

Agency theory dijadikan teori dasar untuk meneliti mengenai pengaruh *size, wealth, intergovernmental Revenue* dan belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat.

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan *principal* dan agen yang mempunyai hubungan kontraktual. Prinsipal mendelegasikan kepada agen untuk melakukan tupoksinya atas nama *principal*. Menurut Zimmerman (1977) *agency problem* ini ada pada semua jenis organisasi baik itu sektor publik maupun sektor privat. Di sektor privat terjadi antara *stakeholders* dengan manajemennya, sedangkan di sektor publik, *agency problem* ini terjadi antara pemerintah dengan rakyat (masyarakat) dimana rakyat adalah *principal* yang mendelegasikan kewenangan dan pemerintah sebagai agen, untuk mengelola pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam *agency theory* itu muncul *conflict of interest* yaitu sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa baik *principal* maupun agen mempunyai kecenderungan yang sama yaitu berusaha mengutamakan tujuan masing-masing (Jensen, & Meckling 1976). Agen berkepentingan dalam memaksimalkan keuntungan *principal*, namun agen juga berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri, sehingga ada kecenderungan untuk agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan *principal*. Dengan demikian akan muncul konplik berupa *information asymetri* yaitu ketidakseimbangan informasi antara informasi yang diperoleh *principal* berbeda dengan informasi yang diperoleh agen. LPPD merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah selama satu tahun dengan menggunakan RKPD sebagai landasannya yang disampaikan kepada pemerintah (Permendagri No. 73 Tahun 2009). Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau yang biasa disingkat EKPPD merupakan suatu proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis secara sistematis menggunakan sistem pengukuran kerja. Sistem ini mencakup penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) (Permendagri No 73 Tahun 2009). IKK adalah integrasi dalam sistem evaluasi kinerja dari masing-masing SKPD, yang berisi data sesuai dengan capaian kinerja sesuai dengan tupoksinya, sampai dengan tingkat nasional.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *Size* terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat.

Semakin besar ukuran daerah yang dinilai dari semakin besarnya total aset pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah (Kusumawardhani, 2012). Akan tetapi jika pemerintah daerah mempunyai aset yang besar kemungkinan menghambat kinerja karena misalnya belanja yang seharusnya dinikmati masyarakat teralokasi untuk pemeliharaan aset, sehingga banyaknya aset bisa menjadikan kinerja pemerintah buruk. Hal lainnya diungkapkan oleh Marfiana (2013) dan Nugroho dan Prasetyo (2018), menurutnya ukuran pemda yang diprosikan dengan besar kecilnya total aset tidak menunjukkan baik dan buruknya kinerja pemda, hal ini karena adanya faktor in efisiensi dalam pengelolaan asetnya dan besarnya aset yang dimiliki ternyata tidak meningkatkan kinerja pemda hal ini disebabkan karena banyaknya aset di pemda tersebut merupakan aset yang tidak dapat dimanfaatkan secara produktif. Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diuji adalah:

H1: *Size* organisasi pemda memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah Jawa Barat.

Pengaruh *Wealth* Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat.

Wealth atau tingkat kekayaan daerah. Kekayaan merupakan kemampuan dalam membiayai kebutuhannya. Tingkat kekayaan daerah ditunjukkan oleh PAD. Pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tupoksinya untuk melayani masyarakat dengan cara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat yang lebih baik salah satunya dibiayai dengan pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki pemerintah daerah seharusnya pemerintah daerah tersebut mempunyai dana yang besar dalam melaksanakan tupoksinya. Atas dasar itu semakin besar PAD seharusnya kinerja pemda lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruliana (2015) yang menganalisa tingkat efektivitas dari pendapatan menyatakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari kekayaan daerah berupa hasil minyak dan gas memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja pemerintahan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Prasasti dan Purnamasari (2017), Puspita (2018) yang menyatakan bahwa terdapat berpengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan kinerja keuangan daerah, artinya semakin besar total Pendapatan Asli Daerah maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Raharjo (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja karena masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat atas pajak dan retribusi. Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diuji adalah:

H2: *Wealth* memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat.

Semakin banyaknya dana alokasi umum berarti menunjukkan semakin besar dana yang diperoleh dalam membiayai tupoksi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. meningkatnya kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kinerja yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut berhasil mengoptimalkan dana tersebut.

Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nugraha dan Prasetyo (2018) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif

terhadap kinerja karena DAU yang diperoleh pemerintah daerah berhasil dimanfaatkan secara maksimal.

Akan tetapi banyaknya dana alokasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut masih ketergantungan dana dari pusat dibandingkan dengan mengoptimalkan potensi kekayaan yang dimiliki daerah tersebut, sehingga banyaknya DAU membuat masyarakat menilai kinerja pemerintah daerah buruk karena tidak bisa mengoptimalkan potensi kekayaan daerahnya. Penelitian yang dilakukan oleh Harumiati dan Payamta, (2014) yang menyatakan bahwa DAU pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, serta hasil penelitian Khasanah and Rahardjo (2014) yang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki *intergovernmental revenue* yang tinggi terhadap pemerintah pusat, sehingga menyebabkan pemerintah daerah tidak memprioritaskan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diuji adalah

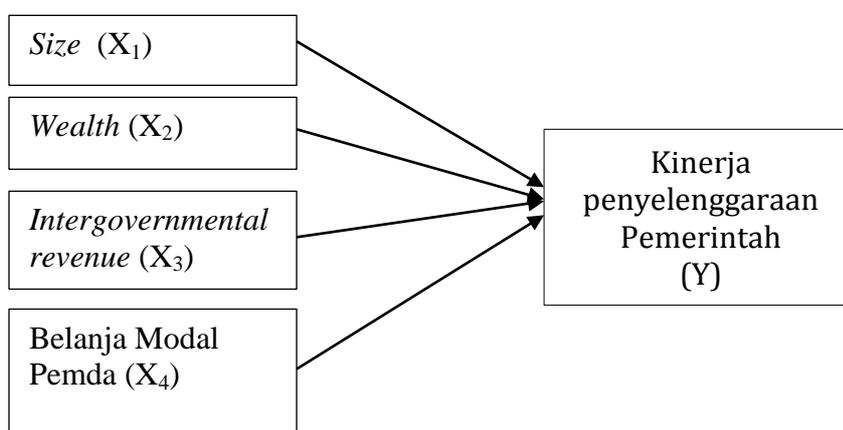
H3: *Intergovernmental revenue* memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah Jawa Barat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat.

Semakin besar belanja modal berarti program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah semakin banyak dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik sehingga berdampak meningkatnya juga kinerja pemerintah, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Halim (2007) bahwa peningkatan kinerja pemerintah daerah salah satunya di topang oleh adanya kegiatan belanja modal. Senada dengan pernyataan Wulandari (2018) yaitu banyaknya alokasi pada belanja modal diharapkan dapat membantu untuk memperoleh sumber keuangan sehingga dapat menambah pendapatan daerah, dan akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Prasetyo (2018) yang menilai belanja modal tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara efektif, karena lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumtif dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Sysdiani (2016) yang menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4: Belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Teknik dan Pengumpulan Data

Penelitian ini berasal dari sumber data sekunder, yaitu hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit oleh BPK, Penulis mendapatkan data tersebut secara langsung dari Kantor Perwakilan BPK Jawa Barat. Selanjutnya Laporan Keuangan yang diperoleh dianalisis dan dirinci berupa neraca untuk mengetahui total aset dan Laporan Realisasi Anggaran untuk mengetahui total PAD dan DAU dan belanja modal. Sedangkan laporan hasil EKPPD diperoleh dari situs Kemendagri tahun 2016 dan tahun 2018, data sekunder lainnya berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Literatur.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat. Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah *purposive sampling* dengan ketentuan pemerintah daerah yang dipilih memiliki semua data yang lengkap meliputi: Neraca untuk mendapatkan total aset, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, Belanja Modal dan hasil EKPPD.

METODE ANALISIS

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi berganda yang digunakan yaitu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

X₁ = *Size* (Total Aset)

X₂ = *Wealth* (Pendapatan Asli Daerah)

X₃ = *Intergovernmental Revenue* (Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat /DAU)

X₄ = Belanja Modal

α = Bilangan Konstanta

β_{1234} = Koefisien regresi

e = error

Variabel Penelitian

Variabel *Size* (Ukuran Daerah)

Size/ ukuran dapat diukur dengan jumlah karyawan, total penjualan dan jumlah aset yang dimiliki organisasi (Daft, 2007). *Size* yang digunakan untuk penelitian ini adalah Total aset pada neraca laporan keuangan. Pertimbangan penggunaan aset dalam pengukuran ini karena nilai aset dinilai lebih stabil daripada kriteria lainnya. Penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset.

Variabel *Wealth* (Tingkat Kekayaan Daerah)

Dalam penelitian ini diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu membandingkan PAD dengan Total Pendapatan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel *Intergovernmental Revenue* (Tingkat Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat)

Dalam penelitian ini diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu membandingkan DAU dengan Total Pendapatan. sumber pendapatan daerah yang berperan dalam pelaksanaan Otonomi daerah guna perbaikan *public service* dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo,2006).

Variabel Belanja Modal

Pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. (PP No 71 Tahun 2010), dengan membandingkan Belanja Modal dengan Total Belanja.

Variabel Kinerja

Capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari input, proses, output dan outcome (Permendagri No 73 Tahun 2009). Menggunakan Skor 3,00 - 4,00 Sangat tinggi, Skor 2,00 – 2,99 Tinggi, Skor 1,00 – 1,99 Sedang, Skor 0,00 – 0,99 Rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Size (Total Aset)	72	1351756386482,91	28614139178798,09	6976622526116,2490	6810269157901,02900
Wealth	72	,0600	,6740	,228903	,1351866
Intergovernmental Revenue	72	,0450	,5860	,422625	,1071627
Belanja Modal	72	,0250	,3700	,210139	,0657910
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	72	27267,00	34967,00	32111,9722	1485,74368
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mendeteksi dalam sebuah model regresi apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak, sedangkan untuk model regresi yang baik adalah berdistribusi secara normal. Untuk memperkuat dapat juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai probabilitas (Sig) lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa residu dalam model regresi tersebut berdistribusi normal, dengan menggunakan SPSS versi 19.0 hasil pengujian disajikan seperti di bawah ini :

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,02011624
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,070
	Negative	-,046
Test Statistic		,596
Asymp. Sig. (2-tailed)		,869

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan *output* SPSS di atas diperoleh nilai Sig. sebesar 0,869. Dikarenakan nilai *p-value* tersebut lebih besar dari alpha ($0,869 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mendeteksi dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan uji glejser

Tabel 3
Hasil Uji Glejser

	Model	Sig.
1	(Constant)	.001
	Size (X1)	.054
	Wealth (X2)	.059
	Intergovernmental Revenue (X3)	.106
	Belanja Modal (X4)	.171

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji glejser diatas, diketahui bahwa pada model tidak terdapat masalah heterokedastisitas karena nilai sig. masing-masing variabel bebas lebih besar dari alpha ($> 0,05$).

Uji Autokorelasi

Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi pada waktu yang berbeda antara anggota observasi satu dengan observasi lain. Dalam kaitannya dengan asumsi metode kuadrat terkecil (OLS), asumsi yang terpenting tidak adanya hubungan antara residu satu dengan residu yang lain.

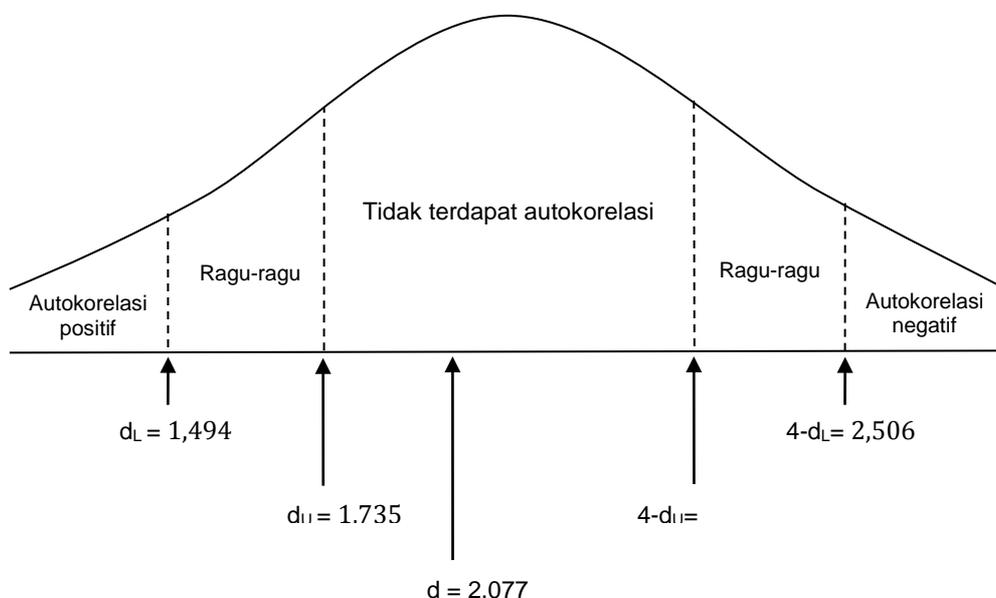
Tabel 4
Nilai Statistik Durbin-Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,908 ^a	,825	,814	,020708	2,077

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X4), Intergovernmental Revenue (X3), Size (X1), Wealth (X2)

b. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019



Gambar 2
Kurva Pengujian Hipotesis Uji Autokorelasi

Dari tabel di atas diperoleh nilai d sebesar 2,077. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai d_L dan d_U pada tabel *Durbin-Watson*. Untuk $\alpha = 0,05$, $k = 4$ dan $n = 72$, diperoleh $d_L = 1,494$ dan $d_U = 1,735$. Karena d terletak di antara d_U (1,735) dan $4-d_U$ (2,265), maka disimpulkan bahwapada model tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi apakah pada model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, dapat dilihat dengan cara adanya tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan begitu dapat diketahui variabel mana yang dapat menyebabkan multikolinieritas.

Tabel 5
Nilai VIF Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Size (X1)	,805	1,242
	Wealth (X2)	,393	2,547
	Intergovernmental Revenue (X3)	,419	2,385
	Belanja Modal (X4)	,937	1,067

a. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas dibawah 10, yakni $Size (X_1) = 1,242$; $Wealth (X_2) = 2,547$; $Intergovernmental Revenue (X_3) = 2,385$ dan $Belanja Modal (X_4) = 1,067$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas.

Model Regresi

Regresi Linier Berganda: Pengaruh *Size (X₁)*, *Wealth (X₂)*, *Intergovernmental Revenue (X₃)* dan *Belanja Modal (X₄)* terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)

Analisis regresi berganda adalah suatu analisis yang digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya (Sugiyono : 275). Pada penelitian ini, analisis regresi berganda dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara *Size (X₁)*, *Wealth (X₂)*, *Intergovernmental Revenue (X₃)* dan *Belanja Modal (X₄)* terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y). Tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungan sebab-akibat terhadap nilai variabel lain.

Model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

X₁ = *Size*

X₂ = *Wealth*

X₃ = *Intergovernmental Revenue*

X₄ = *Belanja Modal*

a = Bilangan konstanta

b_{1,2,3,4} = Koefisien regresi

e = *error*

Output hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,538	,219		25,314	,000
	Size (X ₁)	,730	,046	,902	15,829	,000
	Wealth (X ₂)	,012	,004	,239	2,930	,005
	Intergovernmental Revenue (X ₃)	,093	,011	,686	8,685	,000
	Belanja Modal (X ₄)	,008	,003	,128	2,429	,018

a. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,538 + 0,730 X_1 + 0,012 X_2 + 0,093 X_3 + 0,008 X_4$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

a = 5,538; artinya jika *Size (X₁)*, *Wealth (X₂)*, *Intergovernmental Revenue (X₃)* dan *Belanja Modal (X₄)* bernilai nol (0), maka Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y) akan bernilai 5,538 satuan;

b₁ = 0,730; artinya jika *Size (X₁)* meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,730 satuan;

b₂ = 0,012; artinya jika *Wealth (X₂)* meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,012 satuan;

- $b_3 = 0,093$; artinya jika *Intergovernmental Revenue* (X_3) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,093 satuan;
- $b_4 = 0,008$; artinya jika Belanja Modal (X_4) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,008 satuan.

Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Analisis korelasi *Pearson Product Moment* digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua atau lebih variabel bila data variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari masing-masing variabel adalah sama (Sugiyono : 2013).

Tabel 7
Nilai Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment*
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,908 ^a	,825	,814	,020708

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X_4), *Intergovernmental Revenue* (X_3), *Size* (X_1), *Wealth* (X_2)

b. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,908. Nilai tersebut kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria Guilford sebagai berikut: Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi yang disajikan di atas, maka koefisien korelasi sebesar 0,908 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat.

4.1.4 Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Size* (X_1), *Wealth* (X_2), *Intergovernmental Revenue* (X_3) dan Belanja Modal (X_4) terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y), dapat dilihat dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 8
Pengaruh *Size* (X_1), *Wealth* (X_2), *Intergovernmental Revenue* (X_3) dan Belanja Modal (X_4) terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,908 ^a	,825	,814	,020708

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X_4), *Intergovernmental Revenue* (X_3), *Size* (X_1), *Wealth* (X_2)

b. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

$$\begin{aligned} KD &= R^2 \times 100\% \\ &= (0,908)^2 \times 100\% \\ &= 82,5\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 82,5% yang menunjukkan arti bahwa *Size* (X_1), *Wealth* (X_2), *Intergovernmental Revenue* (X_3) dan *Belanja Modal* (X_4) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 82,5% terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y). Sedangkan sisanya sebesar 17,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui persentase pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap pergerakan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y), maka digunakan rumus Koefisien Beta \times Zero-order, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 9

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	5,538	,219		25,314	,000			
Size (X1)	,730	,046	,902	15,829	,000	,739	,888	,809
Wealth (X2)	,012	,004	,239	2,930	,005	,086	,337	,150
Intergovernmental Revenue (X3)	,093	,011	,686	8,685	,000	,197	,728	,444
Belanja Modal (X4)	,008	,003	,128	2,429	,018	,021	,284	,124

a. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

1. Variabel X_1 = $0.902 \times 0.739 = 0,6666$ = 66,66%
2. Variabel X_2 = $0.239 \times 0.086 = 0,0206$ = 2,06%
3. Variabel X_3 = $0.686 \times 0.197 = 0,1351$ = 13,51%
4. Variabel X_4 = $0.128 \times 0.021 = 0,0027$ = 0,27%

Berdasarkan dari hasil perhitungan persentase secara parsial diatas, maka dapat diketahui bahwa *Size* (X_1) memberikan pengaruh sebesar 66,66% terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y); *Wealth* (X_2) memberikan pengaruh sebesar 2,06% terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y); *Intergovernmental Revenue* (X_3) memberikan pengaruh sebesar 13,51% terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y) dan *Belanja Modal* (X_4) memberikan pengaruh sebesar 0,27% terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan adalah suatu pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama atau simultan variabel bebas (independen) berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

Hipotesis:

- H_0 : *Size* (X_1), *Wealth* (X_2), *Intergovernmental Revenue* (X_3) dan *Belanja Modal* (X_4) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y);

H_1 : Size (X_1), Wealth (X_2), Intergovernmental Revenue (X_3) dan Belanja Modal (X_4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Tabel 10
Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,135	4	,034	78,912	,000 ^b
	Residual	,029	67	,000		
	Total	,164	71			

a. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X_4), Intergovernmental Revenue (X_3), Size (X_1), Wealth (X_2)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan *output* di atas diketahui nilai F_{hitung} sebesar 78,912 dengan *p-value* (sig) 0,000. Dengan $\alpha = 0,05$ serta derajat kebebasan $v_1 = 4$ dan $v_2 = 67$ ($n - (k+1)$), maka di dapat F_{tabel} 2,509. Dikarenakan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($78,912 > 2,509$) maka H_0 ditolak, artinya Size (X_1), Wealth (X_2), Intergovernmental Revenue (X_3) dan Belanja Modal (X_4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Hasil perhitungan pengujian parsial adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,538	,219		25,314	,000
	Size (X_1)	,730	,046	,902	15,829	,000
	Wealth (X_2)	,012	,004	,239	2,930	,005
	Intergovernmental Revenue (X_3)	,093	,011	,686	8,685	,000
	Belanja Modal (X_4)	,008	,003	,128	2,429	,018

a. Dependent Variable: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Pengujian Hipotesis Parsial Variabel Size (X_1)

H_0 : Size (X_1) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y);

H_1 : Size (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 67 ($n - (k+1)$) didapat nilai t_{tabel} 1,996. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Size (X_1) sebesar 15,829 dan t_{tabel} 1,996. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Size (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Pengujian Hipotesis Parsial Variabel Wealth (X_2)

H_0 : Wealth (X_2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y);

H_1 : Wealth (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 67 ($n - (k+1)$) didapat nilai t_{tabel} 1,996. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Wealth (X_2) sebesar

2,930 dan t_{tabel} 1,996. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Wealth* (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Pengujian Hipotesis Parsial Variabel *Intergovernmental Revenue* (X_3)

H_0 : *Intergovernmental Revenue* (X_3) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y);

H_1 : *Intergovernmental Revenue* (X_3) berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 67 ($n - (k+1)$) didapat nilai t_{tabel} 1,996. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel *Intergovernmental Revenue* (X_3) sebesar 8,685 dan t_{tabel} 1,996. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Intergovernmental Revenue* (X_3) berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Pengujian Hipotesis Parsial Variabel *Belanja Modal* (X_4)

H_0 : *Belanja Modal* (X_4) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y);

H_1 : *Belanja Modal* (X_4) berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 67 ($n - (k+1)$) didapat nilai t_{tabel} 1,996. Dari perhitungan diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel *Belanja Modal* (X_4) sebesar 2,429 dan t_{tabel} 1,996. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya *Belanja Modal* (X_4) berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y).

Pembahasan

Pengaruh *Size* terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel pengujian hipotesis parsial terlihat bahwa variabel *size* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh taraf Signifikansi (Sig) variabel *size* sebesar $0,000 < \alpha$ dengan $\alpha=0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriyasari (2012) dan Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa variabel *size* memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan keuangan 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya total aset pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat mengalami kenaikan tiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2015 hampir seluruh pemerintah daerah di Wilayah Jawa Barat mengalami penurunan total aset kecuali Kota Cirebon dan Kota Bekasi yang pada tahun tersebut masih mengalami kenaikan pada total asetnya. Penurunan aset tersebut karena adanya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintah, penerapan SAP berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang penyisihan piutang dan akumulasi penyusutan aset tetap, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan pada total aset pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat kecuali pada Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon.

Di lihat dari skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menunjukkan bahwa skor setiap pemda setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Aset sebagai sumber daya ekonomi digunakan oleh pemerintah daerah yang diharapkan dapat memperoleh manfaat di masa depan. Pemerintah daerah yang mempunyai *size* / ukuran besar dapat dilihat dengan total aset yang tinggi, total aset yang tinggi seharusnya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar karena adanya tuntutan dari masyarakat dalam memanfaatkan aset tersebut. Semakin banyak aset menunjukkan semakin tingginya kegiatan operasional yang dapat dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial baik itu untuk pemerintah maupun masyarakat di masa yang akan datang. Banyaknya aset yang dikelola secara baik akan meningkatkan produktivitas dari aset tersebut. Secara ekonomi aset dapat meningkatkan pendapatan dan secara sosial

besarnya aset akan dapat meningkatkan pelayanan publik. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mensejahterakan dan meningkatkan pelayanan publik akan mendorong pada peningkatan skor dan peringkat kinerja pada EKPPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *size* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 66,66% dimana pengaruh tersebut menunjukkan melalui analisis koefisien determinasi sehingga sisanya sebesar 33,34% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model penelitian.

Pengaruh *Wealth* terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel pengujian hipotesis parsial terlihat bahwa variabel *wealth* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh taraf Signifikansi (Sig) variabel *wealth* sebesar $0,005 < \alpha$ dengan $\alpha=0,05$, dengan kata lain, H_2 pada penelitian ini diterima yaitu *Wealth* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifka Anisa dan Henny Murtini (2018) bahwa kekayaan daerah (*wealth*) mencerminkan bagaimana kinerja pemerintah di daerahnya, sehingga apabila pemerintah daerah memiliki kekayaan yang tinggi akan berusaha menunjukkan kepada *stakeholder* bahwa kinerja pemerintahannya baik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ruliana (2015) yang menganalisa tingkat efektivitas dari pendapatan, menyatakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari kekayaan daerah berupa hasil minyak dan gas memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja pemerintahan serta penelitian lainnya dilakukan oleh Juliawati *et all* (2012), Prasasti dan Purnamasari (2014), Ristu Pratiwi, Y Anni Aryani (2016) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara pendapatan asli daerah dengan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *wealth* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 2,06% dimana pengaruh tersebut menunjukkan melalui analisis koefisien determinasi sehingga sisanya sebesar 97,94% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model penelitian.

Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2014, 2015 dan 2016 besarnya Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali Kota Tasikmalaya tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, disebabkan karena besarnya anggaran yang ditetapkan oleh pemda tersebut jg mengalami penurunan. Akan tetapi realisasi untuk pendapatan asli daerah tersebut diatas dari anggaran sebesar 103,38 %. Masih adanya beberapa hambatan dalam pencapaian target PAD di lingkungan pemda diantaranya yaitu : 1. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. 2. Belum optimalnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pendapatan asli daerah di bidang tugasnya. 3. Keterbatasan sosialisasi dan penyebar informasi tentang peraturan pajak dan retribusi. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah melakukan langkah-langkah seperti berikut : 1. Peningkatan sistem operasional, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Peningkatan kinerja BUMD. 3. Peningkatan pengawasan pengendalian pengelolaan pajak asli daerah.

Berdasarkan ketercapaian realisasi pemerintah daerah yang lainnya mayoritas berada di atas target yang telah ditentukan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Beberapa masalah yang teratasi dengan adanya pendapatan asli daerah diantaranya pengangguran, kemunduran ekonomi dan lain-lain. Selain itu besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pemda tersebut dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan skor dan peringkat penyelenggaraan pemerintah. Skor yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah telah baik.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Penyelenggaraan Daerah

Berdasarkan tabel pengujian hipotesis parsial terlihat bahwa variabel *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh taraf Signifikansi (Sig) variabel *intergovernmental revenue* sebesar $0,000 < \alpha$ dengan $\alpha=0,05$, dengan kata lain, H_3 pada penelitian ini diterima yaitu *intergovernmental revenue* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yayuk Harumiati (2014), Khasanah dan Raharjo (2014), Suryaningsih & Suryani (2016), dan Nugroho (2018) dalam Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah di Kab/Kota Jawa Timur, menyebutkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat telah mengalokasikan sepenuhnya dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat. Realisasi mencapai 100% dari yang dianggarkan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan DAU itu untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sesuai Permendagri No. 30 tahun 2007. hal ini dengan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengelola DAU seperti dibawah ini :1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat (Menkeu dan Kemendagri) dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.2.Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan perimbangan.3.Meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan penggunaan dana perimbangan. 4. Meningkatkan penyerapan penggunaan DAU sesuai peruntukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 13,51% dimana pengaruh tersebut menunjukkan melalui analisis koefisien determinasi sehingga sisanya sebesar 86,49% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model penelitian. Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini termasuk kategori rendah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel pengujian hipotesis parsial terlihat bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan oleh taraf Signifikansi (Sig) variabel *size* sebesar $0,000 < \alpha$ dengan $\alpha=0,05$, dengan kata lain, H_4 pada penelitian ini diterima yaitu belanja modal mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyani & Wibowo, (2017) dan Wulandari,(2014) yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal telah memberikan kontribusi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai program, kegiatan atau proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kepentingan masyarakat. Kegiatan belanja modal yang dilakukan sebagai bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun tidak berdasarkan *profit oriented*. Ukuran keberhasilan belanja modal dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah mutu yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, jumlah yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal tersebut tepat waktu, belanja modal tersebut mengarah untuk kepentingan masyarakat serta biaya yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. (Halim, 2014). Kegiatan belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang terdapat disuatu daerah diharapkan dapat memenuhi berbagai sektor yang diperlukan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas/pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan berimplikasi terhadap kinerja pemerintahan sehingga dapat meningkatkan hasil EKPPD dengan naiknya peringkat dan skor penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 0,27% dimana pengaruh tersebut menunjukkan melalui analisis koefisien determinasi sehingga sisanya sebesar 97,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model penelitian.

MPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : *Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan Belanja*

Modal berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemda di wilayah Jawa Barat; Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan : pertama Penelitian ini hanya menggunakan data selama 3 tahun dengan 24 pengamatan per tahunnya, sehingga model mengalami beberapa permasalahan dalam pengujian datanya. Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang tidak didukung dengan data primer berupa hasil wawancara. Kedua Penelitian ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari karakteristik atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Saran

Adanya keterbatasan dari penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Untuk peneliti selanjutnya ditambahkan tahun pengamatan menjadi lebih lama dan unit analisisnya lebih banyak (dalam skala nasional) sehingga hasil yang diperoleh dapat menjelaskan gambaran yang sebenarnya. Ditambahkan karakteristik atau faktor-faktor selain yang diteliti dalam penelitian ini guna memperluas hasil empiris pengaruh terhadap kinerja. Untuk Pemerintah Daerah yang diteliti, setiap pemerintah daerah perlu menyiapkan instrument yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset secara professional, transparan, akuntabel, efisiensi dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama bagi sumber yang potensial dari pajak daerah dan retribusi daerah sesuai UU No. 28/2009 dan penerapan pelayanan prima administrasi pajak daerah dan retribusi daerah pada unit penghasil. Pemerintah daerah harus memaksimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum sehingga tidak akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daft, R. L. (2007). *Organizational Theory and Design*.
- Fitriasari, D., Martani, D., & Khairurizka, R. (2013). TINGKAT KESESUAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010 TERHADAP PP NO. 3/2007. In A. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra & Tektur & T. Sipil) (Eds.). Bandung. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/171651-ID-tingkat-kesesuaian-laporan-penyelenggara.pdf>
- Hafizd, S. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting*, 2 Nomor 4, 1–13.
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (P. S. Empat, Ed.). Yogyakarta.
- Halim, A. dan T. D. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (P. S. YKPN, Ed.). Yogyakarta.
- Hariyanto, P. (2018). Mendagri: Otonomi Daerah, Syarat Utama Wujudkan Nawa Cita. *Sindo.News*.
- Harumiati, Y. dan P. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. : *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 75–87. Retrieved from <http://www.steelplates.in/suppliers/aluminium/aluminum-7075-sheets-plates/> (20.06.2017)
- Jensen, M.C & Meckling, W. . (1976). Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 dan 4, p 305-360.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro*

- Journal of Accounting*, 3(3), 1–11. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Korompo, R. & W. (2017). Analysis of Financial Performance in The Government of North Sulawesi.
- Kusumawardhani. (2012). Kusumawardhani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal: Universitas Negeri Semarang. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*.
- Marfiana, N. (2013). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal. Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mulyani, S., & Wibowo Hardiyanto. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15 (1), 57–66.
- Mustikarini, & Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007. *SNA 15 Banjarmasin*, 2004(32), 22.
- Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Permendagri No 73 Tahun 2009. (2009). Peraturan Menteri Dalam negeri No 73 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pitoko, R. A. (2017). Warga Jabar Kritisi Kinerja Aher Lewat Petisi. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://properti.kompas.com/read/2017/03/08/203000521/warga.jabar.kritisi.kinerja.aher.lewat.petisi>
- Ruliana, T. (2015). Revenue Independence of East Kalimantan Province, Indonesian. *Journal of Asian Scientific Research*, 5(7), 340–348. <https://doi.org/10.18488/journal.2/2015.5.7/2.7.340.348>
- Tajudin, I. (2014). The Effect of General Allocation Funds Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds On Investment, Economic Structure And Employment. *Quest Journal*, 2, 54–61.
- Zimmerman, L. J. (1977). The Municipal Accounting Maze : An analysis of political incentives. *Journal Accounting Research*, 15, 107–144.
- Daft, R. L. (2007). *Organizational Theory and Design*.
- Fitriasari, D., Martani, D., & Khairurizka, R. (2013). TINGKAT KESESUAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2010 TERHADAP PP NO. 3/2007. In A. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra & Tektur & T. Sipil) (Eds.). Bandung. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/171651-ID-tingkat-kesesuaian-laporan-penyelenggara.pdf>
- Hafizd, S. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting*, 2 Nomor 4, 1–13.
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (P. S. Empat, Ed.). Yogyakarta.
- Halim, A. dan T. D. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (P. S. YKPN, Ed.). Yogyakarta.
- Hariyanto, P. (2018). Mendagri: Otonomi Daerah, Syarat Utama Wujudkan Nawa Cita. *Sindo.News*.
- Harumiati, Y. dan P. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. : *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 75–87. Retrieved from <http://www.steelplates.in/suppliers/aluminium/aluminum-7075-sheets-plates/> (20.06.2017)

- Jensen, M.C & Meckling, W. . (1976). Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 dan 4, p 305-360.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–11. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Korompo, R. & W. (2017). Analysis of Financial Performance in The Government of North Sulawesi.
- Kusumawardhani. (2012). Kusumawardhani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal: Universitas Negeri Semarang. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*.
- Marfiana, N. (2013). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . Jurnal. Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mulyani, S., & Wibowo Hardiyanto. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15 (1), 57–66.
- Mustikarini, & Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007. *SNA 15 Banjarmasin*, 2004(32), 22.
- Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Permendagri No 73 Tahun 2009. (2009). Peraturan Menteri Dalam negeri No 73 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pitoko, R. A. (2017). Warga Jabar Kritisi Kinerja Aher Lewat Petisi. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://properti.kompas.com/read/2017/03/08/203000521/warga.jabar.kritisi.kinerja.aher.lewat.petisi>
- Ruliana, T. (2015). Revenue Independence of East Kalimantan Province, Indonesian. *Journal of Asian Scientific Research*, 5(7), 340–348. <https://doi.org/10.18488/journal.2/2015.5.7/2.7.340.348>
- Tajudin, I. (2014). The Effect of General Allocation Funds Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds On Investment, Economic Structure And Employment. *Quest Journal*, 2, 54–61.
- Zimmerman, L. J. (1977). The Municipal Accounting Maze : An analysis of political incentives. *Journal Accounting Research*, 15, 107–144.